

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu lembaga keuangan yang ada di Bali yaitu Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Pada setiap tahun perkembangan LPD sangat begitu pesat, hampir setiap desa adat/pakraman di Bali sudah memiliki LPD. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) pertama kali didirikan pada tahun 1985 yang bertujuan untuk mendukung perekonomian rakyat, dengan menyediakan layanan di bidang perkreditan, memungut tabungan dan disalurkan lewat kredit yang efektif dan terarah agar mampu membantu masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah, sehingga masyarakat memiliki kesempatan berwirausaha yang dapat memajukan perekonomian desa.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan badan usaha keuangan milik desa yang melaksanakan kegiatan usaha di lingkungan desa dan untuk krama desa. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dapat didirikan pada desa dalam wilayah Kabupaten/Kota, dimana dalam tiap-tiap desa hanya dapat didirikan satu Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Jadi, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga keuangan milik komunitas adat yang diatur secara mandiri oleh Peraturan Daerah artinya tidak diatur oleh Pemerintah seperti otoritas jasa keuangan lainnya.

Mengingat peranan LPD dalam memajukan perekonomian desa sangatlah nyata, tentunya kesehatan LPD haruslah tetap optimal. Hal ini dapat dilihat dari kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, sehingga Lembaga Perkreditan Desa (LPD) harus mampu menyediakan laporan keuangan dan menyajikan pelaporan keuangan yang berkualitas sehingga dapat memberikan informasi yang detail dan rinci sesuai kebutuhan pengguna.

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dimana informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan (Hidayat, 2018 : 2). Menurut PSAK No.1 (Revisi 2017) bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan pada mereka. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 2004 pihak-pihak yang memanfaatkan laporan keuangan adalah investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah dan masyarakat.

Menurut Fahmi (2013:4) Kualitas laporan keuangan adalah merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh suatu entitas pelaporan. Kualitas laporan keuangan sebuah perusahaan tergantung dari seberapa besar informasi yang disajikan perusahaan bisa berguna bagi

pengguna dan bagaimana perusahaan menyusun laporan keuangan yang ada berdasarkan kerangka konseptual dan prinsip-prinsip dasar dan tujuan akuntansi.

Kualitas laporan keuangan dikatakan baik apabila informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan tersebut dapat dipahami dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan tersebut dapat dibandingkan dengan periode- periode sebelumnya (Ajeng, 2023). Untuk menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik seorang pemimpin berperan besar untuk mengendalikan keuangan di LPD tersebut, dan sangat diperlukan audit internal dari badan pengawas untuk mengecek laporan keuangan setiap bulannya serta diperlukan seorang accounting atau pembuat laporan keuangan yang sudah memahami akuntansi dengan baik (Yuda, 2022).

Fenomena yang pernah terjadi di salah satu LPD di Kabupaten Gianyar adalah LPD Desa Adat Lungsiakan Kecamatan Ubud. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Lisnawati (2017) LPD Desa Adat Lungsiakan pada tahun 2017 pernah dua kali mengalami keterlambatan dalam melaporkan laporan keuangan tiap bulannya pada bulan Juni dan September kepada LPLPD Kabupaten Gianyar. Keterlambatan dalam pelaporan laporan keuangan setiap bulan mengakibatkan LPD Lungsiakan wajib melaporkan laporan keuangannya pada tanggal 5 bulan berikutnya kepada LPLPD Kabupaten Gianyar. Ketua LPD Lungsiakan saat itu I Wayan Darsa menjelaskan hal itu terjadi karena SDM LPD belum mampu mengatasi

operasional SIA dengan baik. Ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan merupakan karakteristik kualitatif yang harus dipenuhi agar laporan keuangan yang disajikan relevan untuk para pemangku kepentingan. Keterlambatan dalam pelaporan keuangan dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan suatu LPD karena akan menimbulkan keraguan tentang keandalan data yang disajikan (Wati, 2024).

Dalam menjalankan tugasnya, suatu perusahaan tentunya memerlukan seorang pemimpin yang memiliki tingkat pemahaman akuntansi yang baik. Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti pandai atau mengerti benar, sedangkan pemahaman merupakan proses, perbuatan memahami atau memahamkan. Orang yang memiliki pemahaman akuntansi adalah orang yang pandai dan mengerti benar mengenai akuntansi (Wayan dan Sri, 2020). Menurut Intania dkk (2019) seseorang dapat dikatakan paham terhadap akuntansi apabila mengerti bagaimana proses akuntansi dilakukan sampai menghasilkan laporan keuangan. Tingkat pemahaman akuntansi dapat diukur dari paham seseorang terhadap proses mencatat transaksi keuangan, pengelompokkan, pengikhtisaran, pelaporan dan penafsiran data keuangan. Dalam membuat laporan keuangan seorang akuntan harus memahami isi dalam laporan keuangan tersebut jika seorang akuntan tidak memiliki pemahaman dalam akuntansi, maka akan sulit untuk mengerti dan mengambil keputusan dalam pelaporan keuangan. Penelitian mengenai pengaruh tingkat pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan yang sebelumnya dilakukan oleh Ardilia (2021), Dewi (2022), dan Antari (2023) menyatakan bahwa tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh positif

terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan Anggreni (2022) dan Marianti (2023) menyatakan bahwa tingkat pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu Sistem Pengendalian Internal. Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya dalam suatu organisasi, serta berperan penting dalam pendeteksian dan pencegahan penggelapan (*fraud*), sehingga laporan keuangan dapat memberikan keyakinan keandalan. Pengendalian internal sangat penting bagi kelangsungan hidup perusahaan. Tanpa pengendalian internal yang memadai perusahaan akan mengalami kesulitan mencapai operasi normal (Sato dan Pan, 2012). Penyusunan laporan keuangan tentu saja sering terjadi kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, sehingga dibutuhkan suatu sistem pengendalian internal yang optimal sehingga dapat menekan terjadinya kesalahan dan penyelewengan dalam batas yang dianggap layak, sehingga apabila hal tersebut terjadi maka akan segera diketahui dan diatasi (Shofa *et al.*, 2022). LPD harus mempunyai sistem pengendalian internal yang memadai dan mampu menjamin bahwa dalam pelaksanaan operasional dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh berbagai pihak dan terjadi praktik-praktik yang tidak sehat yang akan merugikan LPD. Penelitian mengenai pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan yang sebelumnya dilakukan oleh Maynawati (2020), Andari (2022) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Peneliti Ardilia (2021), Samudra (2022),

Antari (2023), dan Eswarani (2023) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang karyawan berupa pengetahuan, ketrampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga karyawan tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien (Astari, 2018). Kompetensi merupakan kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk menunjukkan dan mengaplikasikan ketrampilannya dalam kehidupan nyata. Lingkup kompetensi sumber daya manusia yang dimaksud dalam hal ini adalah sejauh mana kompetensi pegawai LPD khususnya bendahara keuangan memberikan pengaruh bagi dihasilkannya laporan keuangan yang berkualitas. Kompetensi sumber daya manusia yang semakin baik akan menghemat waktu pembuatan laporan keuangan.

Hal ini dapat terjadi jika SDM yang dimanfaatkan telah didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi yang diakui, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kemampuan orang yang menyusun laporan keuangan, kegagalan, dalam memahami dan menerapkan laporan keuangan yang berkualitas berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan keuangan dengan standar yang sudah ditetapkan sehingga keputusan yang diambil berdasarkan keuangan tersebut juga akan salah (Rismawan, 2020). Penelitian mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan yang

sebelumnya dilakukan oleh Sudiarti (2020), Dewi (2022), dan Primadona (2023) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Yanti (2023) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan. Maynawati (2020) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Setiap LPD harus memiliki badan pengawas dalam mengawasi operasional LPD. Badan Pengawas adalah badan yang bekerja dimana tugas pokoknya yaitu menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan dalam suatu perusahaan telah dipatuhi, mengawasi kegiatan yang berlangsung didalam sebuah perusahaan, dan menentukan kehandalan informasi yang dihasilkan oleh perusahaan. Fungsi badan pengawas adalah sebuah aktivitas konsultasi dan meningkatkan operasi organisasi. Badan pengawas membantu organisasi memenuhi tujuan melalui pelaksanaan evaluasi dengan pendekatan disiplin dan sistematis untuk meningkatkan efektivitas manajemen, pengendalian proses tata kelola resiko. Keefektifan badan pengawas diperlukan untuk perencanaan dan pelaporan yang hasilnya akan dievaluasi oleh komite audit (Teja, 2020). Menurut Suartama (2010:19) peran badan pengawas internal secara aktif mengawasi kebijakan, operasional, praktik akuntansi, pelaporan keuangan dan menjadi penghubung antar pengelola dengan auditor eksternal bila diperlukan. Penelitian mengenai pengaruh fungsi badan pengawas terhadap kualitas laporan keuangan yang sebelumnya dilakukan oleh Dewi (2022) dan Cita (2022)

menyatakan bahwa fungsi badan pengawas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Andari (2022) dan Marianti (2023) menyatakan bahwa fungsi badan pengawas tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor terakhir yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah Etika Kepemimpinan. Etika adalah nilai moral yang menjadi acuan bagi manusia secara individu maupun kelompok dalam mengatur segala tingkah lakunya. Menurut Robbins (2006:432) kepemimpinan didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi banyak kelompok menuju pencapaian sasaran. Wibowo (2011) mengartikan bahwa kepemimpinan melibatkan seperangkat proses pengaruh antara orang. Proses tersebut bertujuan untuk memotivasi bawahan, menciptakan visi masa depan, dan mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan. Etika dalam kepemimpinan dikaitkan dengan bagaimana cara pemimpin dapat memimpin pengikutnya dengan tetap mengindahkan kaidah, nilai, dan norma yang berlaku di masyarakat.

Etika kepemimpinan didefinisikan sebagai sifat utama yang harus dimiliki seorang pimpinan agar kepemimpinannya dapat efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seorang pemimpin yang memiliki etika kepemimpinan yang baik dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas karena pimpinan yang dapat dipercaya, memiliki hubungan yang positif terhadap pengikutnya, dapat menilai dan memahami pengikutnya menyebabkan pengikutnya terutama akunting merasa aman dan nyaman dalam bekerja sehingga dapat melakukan pekerjaannya dengan baik,

dan jika pimpinan memiliki sifat yang jujur, bertanggung jawab, adil kritis dapat mengoreksi dengan baik hasil pekerjaan karyawannya terutama akunting sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Penelitian mengenai pengaruh etika kepemimpinan terhadap kualitas laporan keuangan yang sebelumnya dilakukan oleh Cita (2022) dan Antari (2023) menyatakan bahwa etika kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Peneliti Andari (2022), Marianti (2023) menyatakan bahwa etika kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Beberapa faktor diatas akan menunjang kualitas laporan keuangan yang bermutu bagi LPD. Jika kualitas pelaporan keuangannya sudah baik maka dapat menjalankan usaha LPD tersebut secara terus-menerus. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, dengan beberapa permasalahan yang ada maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali penelitian mengenai kualitas laporan keuangan dengan judul **“Pengaruh Tingkat Pemahaman Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Fungsi Badan Pengawas, dan Etika Kepemimpinan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diketahui pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di LPD Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di LPD Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar?
3. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di LPD Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar?
4. Apakah fungsi badan pengawas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di LPD Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar?
5. Apakah etika kepemimpinan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di LPD Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh tingkat pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan di LPD Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar.
2. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan di LPD Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar.
3. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan di LPD Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar.

4. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh fungsi badan pengawas terhadap kualitas laporan keuangan di LPD Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar.
5. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh etika kepemimpinan terhadap kualitas laporan keuangan di LPD Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kebutuhan perpustakaan yang nantinya dapat dipakai sebagai referensi bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian lebih lanjut terhadap masalah yang berhubungan dengan tingkat pemahaman akuntansi, sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, fungsi badan pengawas, dan etika kepemimpinan dalam kualitas laporan keuangan pada LPD.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan kepada LPD untuk langkah selanjutnya agar lebih etis dan profesional terutama dalam kualitas laporan keuangan, serta dapat memberikan masukan kepada pihak perusahaan sehingga dapat lebih meningkatkan lagi dalam pembuatan laporan keuangan yang berkualitas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Menurut Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan keagenan muncul karena adanya kontrak antara pemilik (*principal*) dengan seseorang (*agent*) yang memiliki kemampuan profesional untuk melakukan beberapa jasa atas nama pemilik dan perusahaan. Sandy and Lukviarman (2015) prinsip utama teori keagenan (*Agency Teory*) adalah adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang yaitu pemilik (*principal*) dengan pihak yang menerima wewenang yaitu manajer (*agent*). Teori keagenan dibangun sebagai upaya untuk memahami dan memecahkan masalah yang muncul manakala ada informasi yang tidak lengkap pada saat melakukan kontrak (perikatan). Kontrak dimaksudkan disini adalah kontrak antara *principal* (pemberi kerja misal pemegang saham atau pimpinan perusahaan) dengan *agent* (penerima perintah misal manajemen atau bawahan).

Teori keagenan merupakan korelasi antara keagenan sebagai sebuah perjanjian dimana pemilik mempekerjakan orang atau manajer yang lain untuk mengelola kegiatan dalam perusahaan. *Principal* adalah seorang pemilik saham atau disebut dengan seorang investor, dan *agent* adalah seorang manajer yang menjalankan fungsi manajemen dalam perusahaan. Pokok dari korelasi keagenan yakni adanya diferensiasi fungsi antara

investor dan di pihak manajemen.

Menurut Lubis (2014:91), berbagai riset yang berhubungan dengan teori ini memfokuskan perhatian pada bagaimana agar sistem perjanjian kontrak kompensasi bisa mencapai keseimbangan. Alokasi kinerja perusahaan antara principal dan agen didasarkan pada kontrak tersebut, baik tertulis maupun tidak. Sistem kompensasi dalam kondisi yang ideal langsung dihubungkan dengan perilaku.

Masalah mendasar dalam teori keagenan adalah bagaimana caranya agar agen bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipalnya. Relevansi antara teori agensi dengan kualitas laporan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa. Pihak manajemen (pengurus) LPD selaku pihak agen agar mampu membuat laporan keuangan dalam satu periode akuntansi sebagai bahan pertanggung jawaban. Berdasarkan teori keagenan (*agency theory*), informasi yang tercantum dalam laporan keuangan yang dihasilkan pengurus LPD sehingga dapat berfungsi sebagai acuan untuk memberikan keyakinan kepada pihak principal yaitu anggota LPD yakni masyarakat/desa pakraman bahwa LPD dapat mengelola dana yang ditanamkan dengan baik dan efektif sehingga laporan keuangan yang disampaikan kepada masyarakat dapat diandalkan dan dipercayai keabsahannya.

2.1.2 Lembaga Perkreditan Desa

LPD adalah lembaga keuangan yang dimiliki Desa Pakraman, yang melakukan fungsi keuangan serta melakukan pengelolaan sumber daya keuangan yang menjadi milik Desa Pakraman didalam bentuk simpan pinjam.

Berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menetapkan Raperda tentang Lembaga Perkreditan Desa menjadi perda berdasarkan keputusan DPRD Provinsi Bali No.12 Tahun 2017 disana disebutkan sebagai lembaga perekonomian milik desa pakraman, LPD dikelola dan diarahkan untuk berkontribusi bagi pembangunan Desa Pakraman dan jelaskan pula bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah salah satu wadah kekayaan desa menjalankan fungsinya dalam bentuk usaha-usaha kearah peningkatan taraf hidup Krama Desa.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Bali No. 3 Tahun 2017 tercantum fungsi dan tujuan LPD, antara lain:

- 1) Mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan yang terarah serta menyalurkan modal yang efektif.
- 2) Memberantas gadai gelap dan sejenisnya.
- 3) Menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi warga desa dan tenaga kerja di pedesaan.
- 4) Meningkatkan daya beli dan kelancaran lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di desa.

Peranan LPD sangatlah penting dalam meminjam modal kepada masyarakat untuk mengembangkan suatu usaha. Menurut Cahyadi (2014), Landasan operasional LPD berpegang pada awig-awig desa pakraman, yang mengedepankan ikatan kekeluargaan dan semangat gotong royong antar warga desa pakraman. Pasal 7 Peraturan Provinsi Tingkat 1 Bali Nomor 3 Tahun 2017 menyebutkan bahwa kegiatan kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh LPD adalah sebagai berikut:

- 1) Menerima atau menghimpun dana dari krama desa dalam bentuk tabungan dan deposito.
- 2) Memberi pinjaman kepada krama desa dan desa.
- 3) LPD dapat memberikan pinjaman kepada krama desa lain dengan syarat ada kerjasama antar desa yang diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur.
- 4) Menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atas bantuan dana.
- 5) Menyimpan kelebihan likuidasinya pada bank yang ditunjuk dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.
- 6) LPD dalam kegiatan usahanya menerima dan menyalurkan dana pada masyarakat desa adat serta kegiatan jasa keuangan yang sejenis.

Dapat disimpulkan bahwa LPD merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan yang identik dengan jasa bank yaitu sebagai lembaga perantara keuangan masyarakat. LPD sebagai lembaga keuangan desa dalam kegiatan operasionalnya dilakukan pembinaan dan pengawasan. Pengawasan LPD dilakukan oleh badan pengawas yang diangkat dan diberhentikan oleh krama desa melalui paruman dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagai Kepala Daerah.

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan

Definisi kualitas menurut Mulyana (2010:96) adalah kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian,

serta dicapai melalui pemeriksaan. Kualitas merupakan suatu penilaian terhadap output pusat pertanggungjawaban atas suatu hal, baik itu dilihat dari segi yang berwujud seperti barang maupun segi yang tidak berwujud, seperti suatu kegiatan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut (SAK, 2009).

Pengertian laporan keuangan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) (2012:5) adalah struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas. Jadi, kualitas laporan keuangan dapat diartikan sebagai kesesuaian suatu laporan keuangan dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum dari laporan keuangan adalah penyajian informasi mengenai posisi keuangan (*financial position*), kinerja keuangan (*financial performance*), dan arus kas (*cash flow*) dari entitas yang sangat berguna untuk membuat keputusan ekonomis bagi para penggunanya.

Menurut *Statement of Financial Accounting Concepts* (SFAC) No. 2 kualitas laporan keuangan yang baik memiliki empat karakteristik yaitu:

- 1) Relevan, informasi yang relevan yaitu memiliki manfaat umpan balik (*feedback*), memiliki manfaat prediktif, tepat waktu, dan lengkap.
- 2) Andal yaitu laporan keuangan dapat dikatakan andal jika informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.
- 3) Dapat dibandingkan yaitu laporan keuangan dapat dibandingkan artinya

informasi yang disajikan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

- 4) Dapat dipahami yaitu laporan keuangan dikatakan dapat dipahami jika informasi yang disajikan dapat dimengerti oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), terdapat lima bentuk laporan keuangan, yaitu:

- 1) Neraca

Menurut Hanafi dan Halim (2003:63), neraca adalah laporan yang meringkas posisi keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Neraca menginformasikan posisi keuangan pada saat tertentu, yang tercermin pada jumlah harta yang dimiliki, jumlah kewajiban, dan modal perusahaan. Laporan ini menggambarkan posisi aktiva, kewajiban, dan modal pada saat tertentu.

- 2) Laporan laba rugi

Laporan laba rugi merupakan laporan mengenai pendapatan dan beban-beban suatu perusahaan selama periode tertentu. Laporan laba rugi juga merupakan tujuan utama untuk mengukur tingkat keuntungan dari perusahaan dalam suatu periode tertentu. Menurut Harahap (2006:73) laba rugi ini menggambarkan hasil yang diperoleh atau diterima oleh perusahaan selama satu periode tertentu serta biaya-biaya yang

dikeluarkan untuk mendapatkan hasil tersebut dimana hasil yang dikurangi dengan biaya-biaya merupakan laba atau rugi.

3) Laporan arus kas

Laporan arus kas menginformasikan perubahan dalam posisi keuangan sebagai akibat dari kegiatan usaha, pembelanjaan, dan investasi selama periode yang bersangkutan. Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai aliran kas yang masuk maupun keluar bersih pada suatu periode waktu yang merupakan hasil dari ketiga pokok perusahaan yaitu operasional, investasi dan pendanaan.

4) Laporan perubahan ekuitas

Laporan perubahan modal akan menyediakan informasi terkait jumlah modal yang dimiliki oleh sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Mengingat untuk menyusun laporan perubahan modal dibutuhkan data laba rugi, maka jelas laporan ini dibuat setelah laporan laba rugi.

5) Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan ini dibuat untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci terkait dengan hal-hal yang tertera dalam keempat laporan keuangan lainnya.

2.1.4 Tingkat Pemahaman Akuntansi

Menurut *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA), Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan yang tepat dan dinyatakan dalam satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang setidaknya-tidaknya bersifat finansial dan penafsiran

hasil-hasilnya. Akuntansi menurut Harrison (2012:3) adalah sebagai suatu sistem informasi, yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pengambil keputusan yang akan membuat keputusan yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis. Akuntansi adalah aktivitas mengumpulkan, menganalisis, menyajikan dalam bentuk angka, mengklasifikasikan, mencatat, meringkas, dan melaporkan aktivitas/transaksi suatu badan usaha dalam bentuk informasi keuangan (Rudianto, 2010 : 10).

Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti benar, sedangkan pemahaman merupakan proses perbuatan cara memahami. Paham dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti pandai dan mengerti benar, sedangkan pemahaman adalah proses, cara, perbuatan, memahami atau memahamkan. Ini berarti bahwa orang yang memiliki pemahaman akuntansi adalah orang yang pandai dan mengerti tentang akuntansi mulai dari bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman akuntansi adalah sejauh mana kemampuan untuk memahami akuntansi baik sebagai seperangkat pengetahuan maupun sebagai proses atau praktik (Suari, 2019). Seorang akuntan tidak memiliki pemahaman dalam akuntansi maka akan sulit untuk mengerti dan mengambil keputusan dalam membuat laporan keuangan. Tidak berkualitasnya laporan keuangan juga bisa terjadi karena kurangnya pemahaman akuntansi yang dimiliki oleh akuntan

sehingga laporan keuangan menjadi kurang akurat.

Pemahaman akuntansi sangatlah diperlukan dalam membuat atau menyusun suatu laporan keuangan, dengan adanya kecerdasan atau pengetahuan tentang akuntansi yang baik dan handal maka kualitas pelaporan keuangan suatu perusahaan itu akan lebih bagus dan terhindar dari adanya kesalahan - kesalahan informasi yang dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang pemahaman akuntansi itu sendiri (Putra, 2017).

2.1.5 Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal adalah suatu sistem usaha atau sistem sosial yang dilakukan perusahaan yang terdiri dari struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran untuk menjaga, mengawasi, dan mengarahkan jalan perusahaan agar bergerak sesuai dengan tujuan dan program perusahaan dan mendorong efisiensi serta dipatuhinya kebijakan manajemen.

Menurut Mulyadi (2017:129) sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Tanpa adanya sistem pengendalian internal tujuan perusahaan tidak akan tercapai secara efektif dan efisien.

Sistem pengendalian intern sangat diperlukan dalam suatu organisasi yaitu untuk mengembangkan sumber daya yang efektif dan efisien serta menghindari terjadinya penggelapan, pencurian terhadap aset organisasi yang menimbulkan kerugian bagi organisasi (Purnamawati , 2020 : 148).

Sistem pengendalian internal memiliki lima komponen utama yang dapat dijadikan sebagai alat ukur (Sujarweni , 2019 : 54), sebagai berikut :

- 1) Lingkungan pengendalian, merupakan sarana dan prasarana yang ada di dalam organisasi atau perusahaan untuk menjalankan struktur pengendalian internal yang baik.
- 2) Penaksiran risiko , manajemen perusahaan harus dapat mengidentifikasi berbagai risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Dengan memahami risiko, manajemen dapat mengambil tindakan pencegahan, sehingga perusahaan dapat menghindari kerugian yang besar.
- 3) Aktivitas pengendalian , kegiatan pengawasan merupakan berbagai proses dan upaya yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk menegakkan pengawasan atau pengendalian operasi perusahaan.
- 4) Informasi dan komunikasi, merupakan elemen - elemen yang penting dari pengendalian intern perusahaan. Informasi tentang lingkungan pengendalian penilaian resiko, prosedur pengendalian dan monitoring diperlukan oleh manajemen sebagai pedoman operasional dan menjamin ketaatan dengan pelaporan hukum dan peraturan - peraturan yang berlaku pada perusahaan.
- 5) Pemantuan, merupakan kegiatan untuk mengikuti jalannya sistem informasi akuntansi, sehingga apabila ada sesuatu berjalan tidak seperti yang diharapkan dapat segera diambil tindakan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal merupakan bagian yang sangat penting agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Adapun tujuan sistem pengendalian internal yaitu untuk kelancaran operasi

perusahaan, menjaga kekayaan organisasi, keakuratan laporan keuangan perusahaan, kedisiplinan dipatuhinya kebijakan manajemen, dan agar semua lapisan perusahaan tunduk pada hukum dan aturan yang sudah ditetapkan perusahaan.

2.1.6 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut *International Federation of Accountants* (2014:11) Kompetensi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan peran pekerjaan sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan mengacu pada lingkungan kerja. Seorang akuntan profesional untuk menunjukkan kompetensi sesuai peranannya, harus memiliki pengetahuan profesional yang diperlukan, keterampilan profesional, nilai, etika, dan sikap profesional.

Menurut Yosefrinaldi (2013), sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Mangkunegara, kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan yang dimiliki seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi

secara langsung terhadap kinerjanya yang dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Tiga hal pokok dalam kompetensi SDM yaitu:

- 1) Pengetahuan (*Knowledge*), merupakan penguasaan ilmu dan teknologi yang dimiliki seseorang, dan diperoleh melalui proses pembelajaran serta pengalaman selama kehidupannya. Indikator pengetahuan (*knowledge*) dalam hal ini adalah pengetahuan manajemen bisnis, pengetahuan produk atau jasa, pengetahuan tentang konsumen, promosi dan strategi pemasaran.
- 2) Keterampilan (*Skill*), adalah kapasitas khusus untuk memanipulasi suatu objek secara fisik. Indikator keterampilan meliputi keterampilan produksi, berkomunikasi, kerjasama dan organisasi, pengawasan, keuangan, administrasi dan akuntansi.
- 3) Kemampuan (*Ability*), adalah kapasitas seorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Indikator kemampuan meliputi kemampuan mengelola bisnis, mengambil keputusan, memimpin, mengendalikan, berinovasi, situasi dan perubahan lingkungan bisnis.

Kompetensi sumber daya manusia dapat mendongkrak kinerja seseorang dalam melaksanakan tugas yang kemudian dapat mendorong kinerja organisasi. Kompetensi sumber daya manusia merupakan faktor yang penting dalam penyusunan laporan keuangan agar bisa menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas dan informasi yang dapat dipakai oleh pengguna informasi tersebut.

2.1.7 Fungsi Badan Pengawas

Sesuai dengan pasal 1 ayat (11) Perda No. 3 tahun 2007, yang dimaksud dengan pengawas internal adalah badan pengawas yang dibentuk oleh desa dan bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan LPD. Menurut (Mulyadi, 2012) Badan pengawas adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan yang tugas pokoknya menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen telah dipatuhi, menentukan baik tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan kualitas informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi.

Peran badan pengawas internal secara aktif mengawasi kebijakan operasional, praktik akuntansi, pelaporan keuangan dan menjadi penghubung antara pengelola dengan auditor eksternal (Suartana, 2009).

Tugas dari seorang Badan Pengawas LPD, antara lain:

- 1) Mensosialisasikan keberadaan LPD.
- 2) Memotivasi dan meningkatkan kinerja LPD.
- 3) Mengawasi proses penyaluran kredit dan penanganan kredit macet atau bermasalah.
- 4) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara periodik atau berjadwal serta identitas sesuai dengan program kerja badan pengawas.

Seorang pengawas LPD memiliki beberapa tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Tangung jawab ini dibagi kedalam 4 (empat) fungsi yaitu

- 1) Fungsi Perencanaan, dalam fungsi perencanaan pengawas harus terlibat dalam menetapkan rencana operasi yang terintegritas baik dalam

jangka pendek maupun jangka panjang serta menganalisis dan mengkomunikasikan kepada semua pihak yang terlibat dalam manajemen LPD.

- 2) Fungsi Pengendalian, dalam fungsi pengendalian pengawas harus mengembangkan dan menetapkan norma-norma sebagai ukuran pelaksanaan dan menjadikan pedoman kepada manajemen dalam menjamin adanya penyesuaian hasil dengan rencana yang ditetapkan, yang selanjutnya perlu diadakan analisis perbandingan antara pedoman dengan realisasi secara menyeluruh.
- 3) Fungsi Pelaporan, dalam fungsi pelaporan pengawas perlu menyusun, menganalisis dan menginterpretasikan hasil-hasil yang dicapai oleh manajemen untuk selanjutnya dilaporkan dalam rapat rutin yang dilakukan secara periodik dan terprogram. Pengawas dana manajemen dapat mengevaluasi kegiatan-kegiatan dan secara bersama pula dapat memikirkan jalan keluar yang harus dilakukan apabila ditemukan kendala operasional di lapangan.
- 4) Fungsi Akuntansi, dalam fungsi akuntansi pengawas ikut melaksanakan, menetapkan dan memelihara sistem akuntansi pada semua jenjang dan usaha LPD agar terjamin kewajaran semua transaksi keuangan sesuai dengan syarat pengendalian intern yang baik. Fungsi ini meyakinkan pengawas bahwa semua transaksi yang terjadi di LPD telah dicatat tepat waktu, telah diotorisasi oleh orang yang berwenang dan dilaksanakan oleh orang yang tepat.

Fungsi badan pengawas juga memiliki peran yang sangat penting

dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas pada LPD. Setiap LPD harus mempunyai pengendalian intern yang mampu menjamin bahwa dalam pelaksanaan operasional dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh berbagai pihak yang akan dapat merugikan perusahaan.

2.1.8 Etika Kepemimpinan

Etika secara etimologis dapat diartikan sebagai ilmu tentang apa yang biasa dilakukan, atau ilmu tentang adat kebiasaan yang berkenaan dengan hidup yang baik dan yang buruk (Sukrisno dan Ardana, 2014:26-27). Kepemimpinan merupakan rangkaian aktivitas pemimpin yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan, gaya dan perilaku pemimpin tersebut, serta interaksi antara pemimpin, pengikut dan situasi.

Kepemimpinan sendiri menurut Wahjosumidjo (1987:11) adalah suatu yang melekat pada diri seorang pemimpin yang berupa sifat-sifat tertentu seperti: kepribadian (*personality*), kemampuan (*ability*), dan kesanggupan (*capability*), kepemimpinan sebagai rangkaian kegiatan (*activity*) pemimpin yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan (posisi) serta gaya atau perilaku pemimpin itu sendiri. Frisch dan Huppenbauer (2014:23-43) mendefinisikan bahwa etika kepemimpinan adalah petunjuk atau kaidah yang metur sikap dan perilaku karyawan ketika bekerja didalam perusahaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa etika kepemimpinan adalah seperangkat aturan dan norma-norma yang berlaku didalam perusahaan dan yang menjadi pedoman dan aturan yang berlaku di dalam perusahaan tersebut.

Etika dalam kepemimpinan ini dikaitkan dengan bagaimana etika seorang pemimpin dapat memimpin pengikutnya agar sesuai dengan kaidah maupun norma yang berlaku. Kepemimpinan seorang manajer dapat dikatakan baik jika manajer tersebut dapat menjalankan etika yang baik. Etika kepemimpinan dapat terwujud jika :

- 1) Pemimpin memiliki sifat jujur kepada bawahannya.
- 2) Pemimpin dapat dipercaya oleh para bawahannya sehingga bawahannya merasa aman didekat si pemimpin.
- 3) Pemimpin memiliki hubungan yang positif dengan bawahannya.
- 4) Pemimpin menerima saran dan kritik yang diberikan oleh bawahannya.
- 5) Dapat menilai dan memahami kinerja para bawahannya.
- 6) Bertanggung jawab terhadap semua tugas yang dibebankan dengan cara menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
- 7) Memiliki sifat adil, kritis, rendah hati, dan hormat kepada diri sendiri dan orang lain.

Pemimpin menjadikan etika sebagai dasar mengoptimalkan semua bakat dan potensi sumber daya manusia, dan meningkatkan nilai dari semua sumber daya yang dimiliki oleh organisasi serta menghargai semua kualitas dan kompetensi sumber daya manusia.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Dari beberapa penelitian sebelumnya ini yaitu untuk menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori

yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan dan menjadikan penelitian sebelumnya sebagai referensi dan dapat dijadikan acuan perbandingan dari penelitian ini. Peneliti yang meneliti mengenai tingkat pemahaman akuntansi, sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, fungsi badan pengawas, dan etika kepemimpinan sudah pernah beberapa kali dilakukan.

- 1) Antari (2023) yang menguji “Pengaruh Tingkat Pemahaman Akuntansi, Etika Kepemimpinan, Sistem Pengendalian Internal, Tingkat Pendidikan, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada BPR di Kabupaten Badung”. Variabel independennya adalah tingkat pemahaman akuntansi, etika kepemimpinan, sistem pengendalian internal, tingkat pendidikan, pemanfaatan teknologi informasi. Variabel dependennya adalah kualitas laporan keuangan. Teknik analisis dari penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tingkat pemahaman akuntansi, etika kepemimpinan, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan sistem pengendalian internal dan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
- 2) Eswarani (2023) yang menguji “Pengaruh Sistem Informasi, Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, *Good Corporate Governance*, dan Manajemen Resiko terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada BPR di Kecamatan Sukawati”. Variabel independennya adalah sistem informasi, kualitas sumber daya manusia, sistem

pengendalian internal, *good corporate governance*, manajemen risiko. Variabel dependennya adalah kualitas laporan keuangan. Teknik analisis dari penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable sistem informasi, kualitas sumber daya manusia, manajemen risiko berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan sistem pengendalian internal dan *good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

- 3) Marianti (2023) yang menguji “Pengaruh Etika Kepemimpinan, Fungsi Badan Pengawas, Profesionalisme, Pengalaman Kerja, dan Tingkat Pemahaman Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada LPD di Kecamatan Ubud”. Variabel independennya adalah etika kepemimpinan, fungsi badan pengawas, profesionalisme, pengalaman kerja, tingkat pemahaman akuntansi. Variabel dependennya adalah kualitas laporan keuangan. Teknik analisis dari penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable etika kepemimpinan, fungsi badan pengawas, tingkat pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan profesionalisme dan pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
- 4) Primadona (2023) yang menguji “Pengaruh Kompetensi SDM, Akuntabilitas Kinerja, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pengawasan Internal, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan di SKPD Keluarga Berencana Kabupaten

Kota Se-Bali”. Variabel independennya adalah kompetensi SDM, akuntabilitas kinerja, penerapan standar akuntansi pemerintah, pengawasan internal, pemanfaatan teknologi informasi. Variabel dependennya adalah kualitas laporan keuangan. Teknik analisis dari penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable kompetensi SDM, akuntabilitas kinerja, penerapan standar akuntansi pemerintah, pengawasan internal, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

- 5) Yanti (2023) yang menguji “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada OPD Se-Kabupaten Gianyar”. Variabel independennya adalah pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan peran internal audit. Variabel dependennya adalah kualitas laporan keuangan. Teknik analisis dari penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan peran internal audit berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan variable kompetensi sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

- 6) Andari (2022) yang menguji “Pengaruh Etika Kepemimpinan, Kualitas Sistem Informasi Akuntansi, Fungsi Badan Pengawas, Tingkat Pemahaman Akuntansi, dan Budaya Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada LPD di Kecamatan Blabatuh”. Variabel independennya adalah etika kepemimpinan, kualitas sistem informasi akuntansi, fungsi badan pengawas, tingkat pemahaman akuntansi, budaya organisasi. Variabel dependennya adalah kualitas laporan keuangan. Teknik analisis dari penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable kualitas sistem informasi akuntansi, tingkat pemahaman akuntansi, budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan etika kepemimpinan dan fungsi badan pengawas tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
- 7) Dewi (2022) yang menguji “Pengaruh Komitmen Organisasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, dan Fungsi Badan Pengawas terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada LPD di Kecamatan Mengwi”. Variabel independennya adalah komitmen organisasi, kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem informasi akuntansi, fungsi badan pengawas. Variabel dependennya adalah kualitas laporan keuangan. Teknik analisis dari penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan variable kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem informasi akuntansi,

fungsi badan pengawas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

- 8) Ardilia (2021) yang menguji “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Sistem Informasi Akuntansi, Tingkat Pemahaman Akuntansi dan *Good Corporate Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada LPD di Kecamatan Tampaksiring”. Variabel independennya adalah sistem pengendalian internal, sistem informasi akuntansi, tingkat pemahaman akuntansi, dan *good corporate governance*. Variabel dependennya adalah kualitas laporan keuangan. Teknik analisis dari penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan sistem informasi akuntansi, tingkat pemahaman akuntansi, *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
- 9) Maynawati (2020) yang menguji “Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Denpasar Barat”. Variabel independennya adalah penerapan sistem keuangan desa, sistem pengendalian intern, dan kompetensi sumber daya manusia. Variabel dependennya adalah kualitas laporan keuangan. Teknik analisis dari penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sistem keuangan desa, sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan kompetensi sumber daya

manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

10) Sudiarti (2020) yang menguji “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan *Locus of Control* terhadap Kualitas Laporan Keuangan LPD di Kabupaten Klungkung”. Variabel independennya adalah kompetensi sumber daya manusia dan *locus of control*. Variabel dependennya adalah kualitas laporan keuangan. Teknik analisis dari penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia dan *locus of control* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian-penelitian sebelumnya yaitu untuk menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan dan menjadikan penelitian sebelumnya sebagai reverensi serta dapat dijadikan acuan perbandingan dari penelitian ini. Variabelnya yaitu pengaruh tingkat pemahaman akuntansi, sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, fungsi badan pengawas, dan etika kepemimpinan terhadap laporan keuangan di LPD Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada metode pengumpulan data melalui media kuesioner, dan menggunakan uji regresi linier berganda. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada beberapa teori yang digunakan, beberapa variabel yang digunakan berbeda, lokasi yang diteliti berbeda, dan tahun penelitian yang dilakukan berbeda.